



Jurnal Berkala Fakultas Hukum
UNIVERSITAS GADJAH MADA

MIMBAR HUKUM

Volume 24, Nomor 2, Juni 2012

ISSN 0852-100X

KAJIAN SEMANTIK TERHADAP PRODUK HUKUM TERTULIS DI INDONESIA

Ikhwan M. Said

'MODERN ARBITRATION LEGISLATION': A COMPARISON BETWEEN AUSTRALIAN AND
INDONESIAN LAWS

Rina Shahriyani Shahrullah

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Kurniawan

LEMBAGA DAN FUNGSI PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA

Sulistiyandari

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN

Sularto

WARALABA SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Moch. Najib Imanullah

TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

R.A. Antari Inaka Turingsih

EKSISTENSI HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL

Urip Santoso

PENERAPAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM
PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU

Dwi Haryati, Triyanto Suharsono, dan Mailinda Eka Yuniza

PEMBERDAYAAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA DEPOK JAWA BARAT

Muh. Kadarisman

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT *TAU TAA WANA BULANG* DALAM
MENGKONSERVASI HUTAN DI PROPINSI SULAWESI TENGAH

Sahlan

ASAS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG
MIGAS DAN KETENAGALISTRIKAN

Ida Bagus Radendra Suastama

PERLINDUNGAN HUKUM BENDA CAGAR BUDAYA TERHADAP ANCAMAN
KERUSAKAN DI YOGYAKARTA

Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja

LEGISLASI FIKIH EKONOMI PERBANKAN: SINKRONISASI PERAN DEWAN
SYARIAH NASIONAL DAN KOMITE PERBANKAN SYARIAH

Khotibul Umam

Mimbar Hukum	Vol. 24	No. 2	Hlm. 187 - 375	Yogyakarta Juni 2012	ISSN 0852-100X
-----------------	------------	----------	-------------------	-------------------------	-------------------

MIMBAR HUKUM

Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM

ISSN 0852-100X

Volume 24, Nomor 2, Juni 2012

Halaman 187 - 375

DAFTAR ISI

KAJIAN SEMANTIK TERHADAP PRODUK HUKUM TERTULIS DI INDONESIA <i>Ikhwan M. Said</i>	187 - 197
'MODERN ARBITRATION LEGISLATION': A COMPARISON BETWEEN AUSTRALIAN AND INDONESIAN LAWS <i>Rina Shahriyani Shahrullah</i>	198 - 212
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS <i>Kurniawan</i>	213 - 225
LEMBAGA DAN FUNGSI PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA <i>Sulistiyandari</i>	226 - 240
PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN <i>Sularto</i>	241 - 253
WARALABA SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDO- ONESIA <i>Moch. Najib Imanullah</i>	254 - 266
TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN BIDAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN <i>R.A. Antari Inaka Turingsih</i>	267 - 274
EKSISTENSI HAK PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL <i>Urip Santoso</i>	275 - 288
PENERAPAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU <i>Dwi Haryati, Triyanto Suharsono, dan Mailinda Eka Yuniza</i>	289 - 298
PEMBERDAYAAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK JAWA BARAT <i>Muh. Kadarisman</i>	299 - 317
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT <i>TAU TAA WANA BULANG</i> DALAM MENG- KONSERVASI HUTAN DI PROPINSI SULAWESI TENGAH* <i>Sahlan</i>	318 - 331
ASAS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG- UNDANG MIGAS DAN KETENAGALISTRIKAN <i>Ida Bagus Radendra Suastama</i>	332 - 344
PERLINDUNGAN HUKUM BENDA CAGAR BUDAYA TERHADAP ANCAMAN KERUSAKAN DI YOGYAKARTA <i>Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja</i>	345 - 356
LEGISLASI FIKIH EKONOMI PERBANKAN: SINKRONISASI PERAN DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN KOMITE PERBANKAN SYARIAH <i>Khotibul Umam</i>	357 - 375